

**Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PILAR PENUMBUHKEMBANGAN USAHA  
PRODUKTIF DI DESA MIGRAN PRODUKTIF (DESMIGRATIF) JEPARA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Yuyun Fitriani<sup>1\*</sup>, Bambang Utoyo Suroso<sup>1</sup>, Ani Agus Puspawati<sup>2</sup>**

<sup>1\*</sup>STISIPOL Dharma Wacana Metro, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

<sup>1</sup>*Jurusan Ilmu Administrasi Negara STISIPOL DHARMAWACANA Metro  
Jl. Kenanga No.3, Mulyojati, Kec. Metro Bar., Kota Metro, Lampung 34121*

*\*E-mail: yuyunfitriani01.yf@gmail.com<sup>1\*</sup>*

**Abstrak**

Jumlah masyarakat Desa Jepara yang menjadi PMI mengalami peningkatan setiap tahunnya. Banyaknya jumlah PMI disebabkan oleh penghasilan menjadi PMI yang dianggap sangat menguntungkan oleh sebagian besar masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membentuk program Desmigratif sebagai upaya perlindungan PMI sebelum berangkat ke luar negeri hingga setelah PMI pulang. Salah satu pilar program Desmigratif adalah penumbuhkembangan usaha produktif bagi PMI purna. PMI Purna yang telah kembali ke desa Jepara membentuk usaha produktif diantaranya adalah usaha konveksi dan usaha ternak. Usaha yang telah digagas sejak tahun 2017 memberikan dampak positif bagi PMI purna di Desa Jepara. Tujuan pengabdian untuk penguatan kemampuan kelompok sasaran memasarkan produk dan menaikkan omset penjualannya serta meningkatkan kemampuan mitra membangun relasi dengan pihak lain. Metode pengabdian dilakukan dengan ceramah dan focus group discussion. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelaksanaan pilar penumbuhkembangan usaha produktif di Desa Jepara berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berjalannya usaha konveksi dan usaha ternak kambing. Usaha konveksi melayani pembuatan keset, pakaian seragam, jahit kebaya dan jahit bendera. Sistem pengelolaan usaha adalah dengancara bagi hasil dengan sesame anggota. Hambatan dalam pelaksanaan pilar penumbuhkembangan usaha produktif adalah minimnya kemampuan pemasaran hasil usaha konveksi oleh mitra usaha. Selama ini sistem promosi dilakukan dari mulut ke mulut sehingga jangkauan pasarnya masih sangat terbatas.

**Kata Kunci:** *Desa Jepara, Program Desmigratif, Usaha Produktif*

## PENDAHULUAN

Faktor pendorong utama calon tenaga kerja bekerja di luar negeri adalah terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri dan adanya perbedaan upah yang jauh antara di dalam negeri dan di luar negeri meskipun pekerjaan yang dilakukan sama. Rendahnya tingkat pendidikan calon pekerja membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak (Rizqi, 2018).Melihat keinginan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri cukup besar dan sulitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri pemerintah memutuskan untuk menyalurkan PMI ke luar negeri dengan tujuan mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri.

PMI memiliki permasalahan yang cukup kompleks tidak hanya saat proses pemberangkatannya saja namun juga disaat PMI sudah pulang ke tanah air. Salah satu permasalahan yang timbul saat PMI sudah pulang ke tanah air yakni mengenai penggunaan remitansi.PMI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif justru cenderung lebih berperilaku konsumtif.Hal tersebut menjadi alasan para PMI untuk kembali bekerja ke luar negeri. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji PMI (*remittance*) tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif (Nuraeni, 2018)

Sejak tahun 2017 Desa Jepara di KecamatanWay Jepara Kabupaten Lampung Timur ditetapkan menjadi salah satu Desa Migran Produktif (Desmigratif) dari 220 desa di seluruh Indonesia. Penetapan ini berdasarkan pada banyaknya jumlah masyarakat dalam satu desa yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis 13 agustus 2019 dengan Wahono selaku pendamping Desmigratif Desa Jepara ditemukan bahwa data tahun 2017/2018 ada sekitar 227 kepala keluarga yang terdiri dari 150 orang yang menjadi PMI aktif di luar negeri dan sekitar 248 orang yang telah menjadi purna PMI. Kurun waktu lamanya para PMI bekerja diluar negeri antara 2 sampai 16 tahun.Negara tujuan terbanyak PMI Desa Jepara adalah Hongkong, Singapura dan Taiwan.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membuat klasifikasi jumlah penempatan PMI.Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke-7 nasional sebagai penyumbang jumlah PMI terbanyak hingga periode Desember 2019.Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke-7 setelah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Ponorogo. (BNP2TKI, 2019)

Payung hukum pelaksanaan program Desmigratif adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2019 tentang pemberdayaan komunitas pekerja migran di Desmigratif.Desmigratif adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas PMI.Program Desmigratif memiliki empat pilar. Pertama, pendirian pusat informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi. Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga PMI. Ketiga adalah membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (*Community Parenting*). Keempat adalah pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan.Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahono selaku pendamping Desmigratif Jepara mengungkapkan bahwa dari empat pilar Desmigratif hanya ada dua pilar yang sudah dilaksanakan di Desa Jepara, yakni pilar pertama pendirian pusat informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi dan kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga PMI.

Pilar penumbuhkembangan usaha produktif yang melibatkan keluarga PMI menysasar kelompok PMI purna yang dapat diberdayakan.Kegiatan usaha produktif terbagi menjadi dua jenis usaha yakni usaha konveksi dan usaha ternak.Pelaksanaan kegiatan usaha produktif digerakkan oleh seorang pendamping dan pada masing-masing jenis usaha dipimpin oleh seorang ketua kelompok. Menurut Agustino kegiatan

implementasi kebijakan atau program dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2014).

Berdasarkan uraian diatas keberhasilan pelaksanaan pilar penumbuhkembangan usaha produktif tidak terlepas dari besarnya peran PMI purna dan pendamping program Desmigratif. Maka rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah aspek apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pilar penumbuhkembangan usaha produktif di Desa Jepara Kabupaten Lampung Timur. Tujuan kegiatan pengabdian adalah untuk meningkatkan kemampuan kelompok sasaran memasarkan produk dan menaikkan omset penjualannya.

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian penumbuhkembangan usaha produktif di Desmigratif Jepara dilakukan dengan metode ceramah dan *focus group discussion*. Ceramah dilakukan dengan tema-tema sebagai berikut:

1. Penguatan komunikasi antar anggota kelompok usaha
2. Pengembangan metode promosi melalui media sosial dan pihak swasta

### **Prosedur Pengabdian**

Prosedur kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Pengurusan izin kegiatan (Sudah dilakukan disaat pengajuan permohonan menjadi mitra)
2. Penyebaran undangan kegiatan (dilakukan 2 pekan sebelum pelaksanaan kegiatan).
3. Pelaksanaan kegiatan;
4. Evaluasi kegiatan;
5. Pelaporan kegiatan.

### **Jumlah Subjek Pengabdian**

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini yaitu:

1. Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM Kabupaten Lampung Timur
2. Aparat Pemerintah Desa Jepara
3. Pendamping Program Desmigratif Desa Jepara
4. Masyarakat Desa Jepara

### **Lokasi Pengabdian**

Kegiatan ini dilaksanakan di Desmigratif Desa Jepara. Desmigratif Jepara dipilih karena menjadi kantong TKI terbesar di Kabupaten Lampung Timur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil Pengabdian***

Pilar kedua program Desmigratif bertujuan untuk membantu PMI dan keluarganya agar mereka memiliki keterampilan dan kemauan untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana usaha produktif lainnya. Kegiatan ini dititikberatkan pada purna PMI dengan harapan agar mereka tidak kembali bekerja ke luar negeri dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif. Kegiatan penumbuhkembangan usaha produktif adalah kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat sehingga aktor utama dalam kegiatan ini adalah masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan

usaha produktif keluarga PMI, PMI purna dan keluarganya di Desmigratif berbasis *One Village One Product* (OVOP).

Junaldi selaku koordinator Desmigratif Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan mengungkapkan harapannya dengan berjalannya pilar penumbuhkembangan usaha produktif dapat membuat Purna PMI tidak kembali lagi bekerja ke luar negeri dan meninggalkan keluarga. Selama ini penggunaan remitansi oleh Purna PMI dan keluarganya cenderung digunakan untuk masalah konsumtif seperti merenovasi atau membangun rumah, bukan membeli tanah atau sawah sebagai bentuk investasi di masa depan. (Hasil Wawancara pada 9 Desember 2019)

Subir Asni selaku Kepala Desa Jepara menjelaskan bahwa usaha produktif di Desa Jepara berjalan dengan baik. Ternak yang dikembangkan oleh purna PMI jumlahnya semakin bertambah. Usaha konveksi yang dijalankan oleh ibu-ibu purna PMI juga berkembang pesat. (Hasil Wawancara pada 12 Desember 2019)

Menurut Wahono selaku pendamping Desmigratif Desa Jepara usaha produktif yang melibatkan purna PMI terbagi menjadi dua usaha yakni usaha konveksi dan usaha ternak. Usaha konveksi dijalankan oleh ibu-ibu Purna PMI sedangkan usaha ternak dijalankan oleh bapak-bapak purna PMI. Usaha Konveksi melayani pembuatan pakaian, seragam sekolah, kebaya, keset, dan bendera atau umbul-umbul. Modal awal usaha konveksi berasal dari bantuan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur begitupun dengan modal usaha ternak. Usaha Ternak ini berupa ternak kambing, modal awal ternak kambing berjumlah 19 ekor yang terdiri dari 17 kambing betina dan 2 kambing jantan. Permasalahan yang sering timbul dalam pengelolaan usaha ternak kambing adalah rasa iri antar anggota kelompok karena merasa beberapa anggota lainnya kurang kooperatif dalam menjalankan tugas mencari pakan kambing. Keseluruhan jumlah kambing saat ini 40 ekor sudah dijual dan hasilnya sudah dibagi dengan anggota. (Hasil wawancara pada 14 Desember 2019)

Ihwanuddin selaku ketua kelompok usaha ternak menjelaskan bahwa usaha ternak kambing yang dipimpinnya berjalan dengan baik meskipun mulanya sempat mengalami masalah karena setelah 19 kambing bantuan dari Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Lampung Timur itu datang ada yang mati karena mengalami penyakit. Selanjutnya ada pula yang mati setelah melahirkan. Namun hingga saat ini perkembangan usaha ternak kambing semakin membaik karena jumlah kambing sudah mencapai 40 ekor. Kelompok usaha ternak juga beberapa kali melakukan penjualan kambing ketika mendekati lebaran Idul Adha atau lebaran Idul Fitri yang mana permintaan kambing meningkat sehingga mereka memutuskan untuk menjual beberapa kambing milik kelompok usaha. (Hasil wawancara pada 13 Desember 2019)



Gambar 1 Ternak kambing milik kelompok usaha produktif  
(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019)

Gambar 1 adalah kondisi peternakan kambing milik kelompok usaha produktif yang dikelola oleh bapak-bapak PMI purna. Kambing milik kelompok usaha produktif sesekali diperjualbelikan berdasarkan kesepakatan bersama. Uang hasil penjualan dibagi rata dengan anggota kelompok yang lainnya. Tugas mencari pakan kambing (rumpot) mengikuti jadwal yang sudah dibuat dan disepakati bersama namun terkadang beberapa orang tidak kooperatif dengan jadwal tersebut.

Kemudian menurut Imroatin selaku ketua usaha konveksi menjelaskan bahwa usaha ini mulai berjalan pada akhir tahun 2017 dan beranggotakan 20 orang. Namun hingga saat ini tersisa 10 orang anggota saja. Anggota yang lainnya memilih keluar dan membuka usaha sendiri setelah memiliki keahlian dan mesin jahit sendiri. Mesin jahit yang saat ini dimiliki oleh kelompok konveksi merupakan bantuan dari Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan dari dana APBN yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk program Desmigratif. Selain menjalankan usaha konveksi berupa menjahit pakaian, keset, dan umbul-umbul kelompok usaha konveksi ini juga pernah mendapat pelatihan membuat atas usul ibu-ibu kelompok konveksi. Namun hingga saat ini tidak ada keberlanjutan karena kelompok konveksi enggan mengeluarkan biaya lebih untuk membeli alat membuat yang sewaktu itu sekitar 10 juta. (Hasil wawancara pada 14 Desember 2019)



Gambar 2. Usaha konveksi milik kelompok Desmigratif  
(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019)

Gambar 2 adalah usaha konveksi yang dimiliki kelompok Desmigratif dan dikelola oleh ibu-ibu purna TKI. Beberapa ibu-ibu terlihat sedang menjahit keset dengan berbagai motif. Keset-keset tersebut dipasarkan secara manual dengan dititipkan ke beberapa warung atau orang-orang yang membutuhkan keset dan sudah mengetahui lokasi rumah jahit akan mendatangi rumah jahit sendiri.

Siti Kalimah selaku anggota kelompok usaha konveksi mengungkapkan sistem bagi hasil dari usaha konveksi cukup membantu kebutuhan keluarganya. Meskipun ia mengakui penghasilannya sebagai tukang jahit tak menentu namun cukup membantu kebutuhan keluarganya karena suaminya pun masih bekerja. (Hasil wawancara pada 13 Desember 2019)



Gambar 3. Keset hasil pengembangan usaha produktif  
(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019)

Gambar 3 adalah salah satu hasil dari usaha di bidang konveksi milik TKI purna yang tergabung dalam program Desmigratif. Keset tersebut dibuat dari kain perca yang didatangkan langsung dari toko-toko tekstil. Berbagai macam motif keset dapat dibuat oleh ibu-ibu purna TKI ini, mulai dari keset standar dengan

bentuk bulat atau segi empat hingga keset dalam bentuk karakter seperti keropi dan doraemon. Kreativitas ibu-ibu TKI purna yang tergabung dalam usaha produktif Program Desmigratif cukup tinggi.

Imroatin selaku ketua kelompok konveksi menambahkan bahwa pemasaran produk keset yang sudah dibuat oleh kelompok konveksi masih terbatas. Penjualannya masih dilakukan secara manual dengan menitipkan di beberapa toko atau beberapa pembeli yang sudah mengetahui alamat usaha konveksi akan datang langsung ke lokasi. Selain itu kelompok konveksi mengharapkan adanya kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menjadit seragam batik atau seragam olah raga milik beberapa sekolah disekitar Desa Jepara. Namun tingginya persaingan membuat tidak semua sekolah mau bekerja sama dengan usaha konveksi Desmigratif. (Hasil wawancara pada 14 Desember 2019)

Hasil observasi yang peneliti lakukan selama dilapangan pelaksanaan pilar kedua Desmigratif yakni penumbuhkembangan usaha produktif sudah berjalan dengan baik. Jenis usaha yang dikembangkan di Desmigratif Jepara adalah usaha konveksi dan ternak kambing. Kedua jenis usaha tersebut berdampak baik bagi kelompok usaha. Dalam usaha konveksi ditemukan hambatan berupa kurangnya pemasaran produk. Ibu-ibu purna TKI perlu mendapatkan edukasi mengenai pasar *online* yang saat ini perkembangannya semakin pesat dan cukup menjanjikan. Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan dan berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pilar kedua Desmigratif yakni menumbuhkembangkan usaha produktif sudah berjalan dengan baik di Desa Jepara. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya dua usaha milik kelompok Desmigratif yakni usaha peternakan kambing dan usaha konveksi.

## ***Pembahasan***

Implementasi sebuah program atau kebijakan diawali dengan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami jenis dan bentuk program yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan oleh *stakeholders* pelaksana program di lapangan. Sehingga dalam hal pelaksanaan program Desmigratif Di Desa Jepara sosialisasi ke masyarakat dilakukan oleh pendamping program Desmigratif. (Kartina et, & Nurmaisah (2020)

**Komunikasi** menurut Edward III (1980) Hogwood dan Gunn (1978) dan Roeslie (2018) menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi (atau pentransmisisan informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Pilar kedua Desmigratif melibatkan banyak aktor yakni Pendamping program, Koordinator program dari Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, kepala desa, ketua kelompok usaha konveksi, anggota kelompok usaha konveksi, dan ketua kelompok usaha peternakan kambing. Komunikasi antar aktor berjalan dengan baik. Informasi yang bersifat *top-down* disampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pilar kedua Desmigratif ini menyadari tujuan dilaksanakannya program Desmigratif yakni membentuk kemandirian finansial masyarakat purna TKI. Secara keseluruhan pelaksanaan pilar penumbuhkembangan usaha produktif di Desa Jepara berjalan dengan baik. Terputusnya komunikasi menyebabkan tidak terjadinya transformasi informasi sehingga sangat wajar tidak ada kejelasan informasi dan tidak terjadinya konsistensi informasi (Puspawati, 2018).

**Sumber daya** menurut Edward III (1980), Van Metter dan Van Horn dalam Suharno (2013), Grindle (1980), Hogwood dan Gunn (1978), dan Roeslie (2018) dalam implementasi kebijakan sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia menyangkut segala aspek tentang aktor pelaksana program. Sedangkan sumber daya non manusia bisa berupa sumber daya anggaran dan sarana prasarana. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pilar kedua program Desmigratif adalah para *stakeholder* dan kelompok sasaran itu sendiri. Beberapa hal yang mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia yakni tingkat pendidikan dan pola pikir masyarakat. Tingkat pendidikan yang masih rendah berdampak pada kurangnya kemampuan purna PMI dalam memasarkan produk hasil pekerjaan tangan mereka. Pemasaran keset terbatas pada penjualan secara langsung di lokasi. Padahal di era digital seperti saat ini sangat mungkin untuk menjual keset hasil kerajinan tangan ibu-ibu purna PMI secara online di beberapa *market place* seperti tokopedia, shopee, dan buka lapak. Jikapun menjualnya di *market place* dianggap cukup sulit setidaknya dapat menggunakan media sosial lain seperti facebook dan instagram yang dibuat khusus untuk menjual hasil kerajinan tangan usaha konveksi. Sumber daya lain yang digunakan dalam pelaksanaan pilar kedua program Desmigratif adalah sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran berasal dari APBN yang dianggarkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Pemanfaatan APBN di Desmigratif Jepara dilakukan dengan dibelikan unit mesin jahit untuk usaha konveksi serta pembelian 19 ekor kambing sebagai cikal bakal peternakan kambing yang dikelola oleh bapak-bapak purna PMI. Selain itu anggaran juga digunakan untuk memberikan pelatihan membuat untuk ibu-ibu purna PMI kelompok konveksi.

**Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan** menurut Edward III (1980), Van Horn dalam Suharno (2013), Weimer dan Vining (1999) dan Roeslie (2018) adalah jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Dalam pelaksanaan pilar kedua Desmigratif sikap pelaksana kebijakan saling mendukung satu sama lain dan memahami tupoksi masing-masing. Kemampuan para pelaksana kebijakan dapat diukur dengan *output* dari pilar penumbuhkembangan usaha produktif. Pada pilar ini usaha produktif yang dikembangkan berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat pada pengembangan usaha ternak kambing yang mulanya bermodalkan 19 ekor kambing hingga saat ini berhasil dikembangbiakkan menjadi 40 ekor. Hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan aktor pelaksana program.

**Struktur birokrasi** menurut Edward III (1980), Van Horn dalam Suharno (2013) Hogwood dan Gunn (1978), dan Roeslie (2018) birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Jalinan hubungan kerja sama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksanaan program Desmigratif tidak tercatat secara formal. Secara hirarki program Desmigratif adalah tanggung jawab pemerintah pusat yakni Kementerian Sosial. Namun pada pelaksanaannya di tiap kabupaten/kota tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Di Kabupaten Lampung timur Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM bertindak sebagai penanggungjawab atau koordinator di tingkat kabupaten. Kepala Desa berperan sebagai pengawas di tingkat desa. Pendamping program Desmigratif berperan sebagai pelaksana lapangan.

**Partisipasi masyarakat** menurut Makhmudi & Muktiali (2018:01) dan Nurbaiti & Bambang (2017:226) merupakan proses aktif dimana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dan mengikutsertakan diri di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya. Partisipasi masyarakat diperlukan pada suatu program

yang bersifat pemberdayaan karena keberhasilan program berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilar pengembangan usaha produktif di Desa Jepara sangat tinggi. Hal tersebut tercermin pada berjalannya pilar ini dengan pembentukan dua jenis usaha yakni usaha konveksi dan usaha ternak. Kedua jenis usaha yang dikembangkan berhasil menambah pendapatan purna PMI Desa Jepara. Namun tidak semua purna PMI Desa Jepara tergabung dalam pembentukan kedua jenis usaha tersebut karena beberapa masyarakat lebih memilih untuk mengembangkan usaha milik pribadi seperti warung kelontong milik ibu watiyar.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembentukan usaha produktif berbanding lurus dengan keberhasilan program ini dilaksanakan di Desmigratif Jepara. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari pentingnya peran seorang pendamping program. Pendampingan pengembangan usaha produktif dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok usaha produktif termotivasi untuk terus mengembangkan usahanya.

**Perlunya Keterlibatan Swasta.** Keterlibatan pihak diluar *government* untuk melaksanakan program Desmigratif di Desa Jepara khususnya pilar pengembangan usaha produktif sangat penting untuk dilakukan. Pengembangan usaha produktif memiliki tujuan untuk membangun kemandirian finansial purna PMI agar tidak kembali lagi bekerja di luar negeri. Peran pihak swasta dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun kerjasama antara investor dan kelompok usaha produktif. Investor bertindak sebagai pemilik modal dan pemilik barang baku. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga dapat disebut sebagai pihak swasta. Dimana UMKM yang sudah berkembang seharusnya bekerja sama dengan kelompok usaha kecil agar kedua belah pihak bisa lebih mengembangkan usahanya.

Keterlibatan swasta juga dapat dilakukan dengan cara menjadi jembatan untuk meningkatkan pemasaran hasil produk usaha produktif. Swasta yang dimaksud disini adalah pengusaha swalayan atau pasar yang bisa mengambil barang jadi seperti keset dari kain perca hasil produksi komunitas purna PMI untuk dijual di tokonya. Sehingga jika permintaan swalayan tersebut tinggi maka akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan kelompok usaha produktif Desa Jepara.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan pilar kedua Program Desmigratif yaitu Pilar Penumbuhkembangan usaha produktif di Desa Jepara berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berjalannya usaha produktif berupa usaha konveksi dan usaha ternak kambing. Usaha Konveksi melayani pembuatan keset, pakaian seragam, jahait kebaya, dan jahit bendera. Kedua jenis usaha tersebut dilakukan oleh PMI purna Desa Jepara. Sistem pengelolaan usaha adalah dengan bagi hasil dengan sesame anggota. Hambatan dalam pelaksanaan pilar penumbuhkembangan usaha produktif adalah minimnya kemampuan pemasaran barang oleh mitra usaha. Selama ini sistem pemasaran masih dilakukan secara manual. Teruntuk usaha konveksi pembuatan barang dilakukan jika mitra usaha mendapatkan pesanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Indonesia. Alfabeta.
- BNP2TKI. (2019). *Klasifikasi Jumlah Penempatan PMI*. Jakarta. Badan Penempatan dan Perlindungan TKI.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington.
- Grindle, Marilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation In The World*. New Jersey. Princeton University Press.
- Hogwood, Brian W dan Lewis A. Gunn. (1983). *Policy Analysis For The Real World*. Oxford. Oxford University Press.
- Kartina, Nurjannah, & Nurmaisah. (2020). *Peningkatan Pemahaman Pelaku Umkm Dan Masyarakat Atas Produk Halal Dan Aman Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Juata Laut, Tarakan-Kalimantan Utara*. JPMB (Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo) Volume 4 Nomor 1 Juni 2020 (P-Issn: 2615-4323) (Halaman 15-22) (E-Issn: 2579-9797)
- Makhmudi, Dyah Putri dan Muktiali, Mohammad. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang*. Jurnal Pengembangan Kota (2018) Volume 6 No. 2 (108–117) Retrieved from <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>.
- Nuraeni, Yeni. (2018). *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja*. Jurnal Akuntansi Manajerial Publikasi. Vol. 3, No. 1, Januari - Juni 2018: 42-53.
- Nurbaiti, Siti Robiah dan Bambang, Azis Nur. 2017. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional pada seminar pendidikan biologi Universitas Diponegoro, Semarang Jawa Tengah, Oktober 2017.
- Puspawati, Ani Agus. (2018). *Gap Implementasi Kebijakan Bina Keluarga Tki Di Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik STISIPOL Dharmawacana. Volume 12, Nomor 02, Desember 2018. Issn 1858-2400.
- Rizqi, Maulidiah Amalina. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pada Masyarakat Gresik Utara)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan 2018 | 1161-1174.
- Roeslie, Ernawati. 2018. *Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga*. Universitas Indonesia. Depok
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Indonesia. Penerbit Ombak..
- Weimer, David L dan Vining, Aidan R. (1999). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Princeton University Press. New Jersey.